

SINERGITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

Fitriani Amir^{1*}, Ihyani Malik², Muh Yahya³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to find out the synergy of the Makassar City government in empowering street children. This study used qualitative methods. Data sources consisted of primary data obtained through interviews, and secondary data taken from documents, records, reports, and official archives that could be supported by the integrity of primary data. The results showed that the synergy in empowering street children was carried out by the Social Service and the Makassar City Education Office. With indicators: Coordination carried out by the Social Service by forming a Quick Reaction Team (TRC) but it was still personal and there was no technical picture for education development. Then communication was carried out by establishing a technical implementing unit for the empowerment of street children. As for the synchronization with the harmony between the applicable work rules and the work results obtained for the empowerment of street children who dropped out of school

Keywords: synergy, empowerment, street children

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas pemerintah Kota Makassar dalam pemberdayaan anak jalanan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sinergitas dalam pemberdayaan anak jalanan dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dengan indikator: Koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial dengan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) namun masih bersifat personal dan belum ada gambaran teknis untuk pembinaan pendidikan. Kemudian komunikasi dilakukan dengan pembentukan unit pelaksana teknis pemberdayaan anak jalanan. Adapun sinkronisasi dengan adanya keserasian antara aturan kerja yang berlaku dengan hasil kerja yang diperoleh untuk pemberdayaan anak jalanan yang putus sekolah.

Kata kunci: sinergitas, pemberdayaan, anak jalanan

* fitrianiamir@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia yang kemudian di turunkan dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara.

Salah satu permasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia khususnya di kota-kota besar adalah permasalahan anak jalanan, pengamen, dan juga gelandangan. Kehidupan masyarakat perkotaan terdapat celah kehidupan yang sangat mempriatinkan dengan munculnya kehidupan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di persimpangan jalan, keramaian lalu lintas yang tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Perbedaan yang sangat menonjol pembangunan secara fisik tidak di imbangi dengan pembangunan moral bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan didalam

masyarakat itu sendiri. Pendidikan di lintas sektoral perlu ditingkatkan guna mengangkat citra bangsa didunia Internasional bahwa kebangkitan suatu bangsa ditandai dengan pedulinya masyarakat terhadap kehidupan anak jalanan yang kian hari makin bertambah (Nurdin, 2013).

Kementerian sosial memperkirakan setidaknya terdapat sekitar 50.000 anak yang tinggal dan mencari nafkah di jalan di kota-kota besar di Indonesia pada tahun 1999. Namun mereka sendiri memperkirakan bahwa anak jalanan berjumlah jauh di atas 50.000 anak. Banyak pihak yang juga menyakini bahwa jumlah anak jalanan yang sesungguhnya diatas data yang disebutkan kementerian sosial. Berbagai perkiraan mengenai jumlah anak jalanan yang ada berkisar antara 50.000-170.000 anak. Ini berarti jumlah anak jalanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana mengurangi jumlah anak jalanan, pengemis dan gelandangan.

Saat ini anak jalanan menjadi masalah serius terutama di ibu kota provinsi dan kota-kota besar termasuk Kota Makassar. Keberadaan mereka kerap kali menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban dan

keamanan perkotaan. Saat ini kota Makassar berkembang pesat, bangunan pisik, pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan anak jalanan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah telah lama mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan daerah khusus di Kota Makassar diatur dalam peraturan daerah No 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. Pemerintah daerah dalam peraturan daerah tersebut sendiri telah mencanangkan beberapa program pembinaan, rehabilitasi dan pengalokasian Anak jalanan.

Banyak permasalahan yang dialami oleh anak jalanan, diantaranya adalah tidak memiliki tempat untuk tinggal, terluntang-lantung di jalanan, putus sekolah bahkan terjadi kekerasan pada anak. Anak jalanan perlu menjadi masalah serius sehingga diperlukan sinergitas yang baik oleh pemerintah. Pentingnya koordinasi komunikasi, dan sinkronisasi oleh pemerintah dan stakeholder agar terwujud sinergitas yang lebih baik.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti

dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian dengan judul yang relevan seperti judul penelitian penulis.

Yang pertama penelitian oleh Maulidar, (2019) dengan judul penelitian "*Sinergitas kegiatan pusat pelayanan kesejahteraan sosial (studi kasus kegiatan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pendamping program keluarga harapan dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan TKSK maupun Pendamping PKH di Kecamatan Indrapuri selama ini sudah bersinergi. TKSK dan Pendamping PKH saling kerjasama dan membantu satu sama lain, terutama dilihat dari proses kerjasama dalam bimbingan atau pengarahan, kerjasama dalam pendataan dan kerjasama dalam pembantuan. Adapun faktor pendukung terjalannya kerjasama tersebut adalah adanya fasilitas kerja seperti komputer, kantor, dan alat berkomunikasi (Handphone). Sedangkan faktor penghambat terjalannya kerjasama yaitu tidak memiliki kendaraan yang cukup bagi Pendamping PKH sehingga para

pendamping kebanyakan menggunakan kendaraan milik keluarganya, jika mendapat tugas mendadak. Bahkan terkadang mereka terpaksa meminjam kendaraan tetangga. Faktor penghambat yang lain adalah tidak ada laptop yang diberikan khusus bagi Pendamping PKH, ketika mereka melakukan bimbingan ke lapangan (Maulidar, 2019).

Selanjutnya Penelitian dari Almira Rahmaveda, 2017” *Pemberdayaan anak jalanan di kota Surabaya (Sinergitas antar stakeholders dalam peningkatan kemandirian anak jalanan*“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan masing-masing stakeholders telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya namun, mereka belum memiliki program yang serasi atau berkesinambungan anatar satu instansi dengan nstansi lainnya. Anak jalalan tidak terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, anak jalanan juga tidak mendapatkan pemberdayaan secara berkala, dalam satu tahun pelaksanaan pelatihan untuk anak jalanan hanya diselenggarakan satu bulan saja (Almira. R, 2017).

Selanjutnya Penelitian oleh Lina Nurjannah, 2011 “*Pemberdayaan anak jalanan di kota Malang melalui*

kemitraan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Griya Baca Kota Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak jalanan di Kota Malang pada umumnya menempati daerah-daerah strategis seperti alun-alun Kota Malang, perempatan jalan Ahmad Yani, Matos, Terminal Arjosari, dan seputaran Jagalan serta Muharto. Jumlah anak jalanan di Kota Malang tidak menentu, karena mobilitas anak jalanan yang cenderung dinamis untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sistem drop-drop an anak jalanan dari luar Kota Malang ketika mendekati hari besar akan semakin meningkatkan jumlah anak jalanan di Kota Malang. Faktor penghambat dalam memberdayakan anak jalanan oleh Bidang Sosial dan LPA Griya Baca adalah terbatasnya dana, terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran anak jalanan untuk mengikuti pelatihan, dan database secara menyeluruh tentang anak jalanan masih belum terkumpul di satu lembaga yaitu Bidang Sosial karena mobilitas anak jalanan yang selalu berpindah-pindah. Hal ini menyebabkan program bantuan dan tujuan akhir

dalam memberdayakan anak jalanan tidak maksimal (Lina N, 2011).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mempunyai tipe penelitian ini yaitu deskriptif didukung data kualitatif, Sumber data yang diperoleh peneliti di ambil dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*. Dalam metode ini, peneliti harus bertindak menjadi instrumen kunci. Analisis datanya biasa berupa induktif ataupun deduktif kemudian hasil dari penelitian akan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada makna dari pada sebuah generalisasi (Sugiyono, 2016).

Penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anticipatory sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah

selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Sinergitas Pemerintah Kota Makassar dalam Pemeberdayaan Anak Sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini merupakan hasil dari menganalisis data dan yang terjadi ditempat penelitian serta disesuaikan dengan Sinergitas Pemerintah Kota Makassar dalam Pemberdayaan Anak Jalanan yang menggunakan teori Menurut Slamet Mulyana (2008) menggunakan 3 indikator yaitu Koordinasi, Komunikasi, dan Sinkronisasi

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara, Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan anak jalanan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah

daerah telah lama mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan daerah.

Terkhusus di Kota Makassar pemerintah membuat sebuah peraturan yang berlandaskan UUD 1945 ayat 1 untuk menyikapi mengenai Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar yang dituangkan dalam peraturan daerah No 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. yang membuat pemerintah terkhusus Dinas Sosial menghasilkan beberapa program pembinaan, rehabilitasi dan pengalokasian Anak jalanan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial (peksos) upr rumah perlindungan dan trauma center (RPTC) sebagai fungsinya di bawah Koordinasi Dinas Sosial Kota Makassar.

Dari apa yang disampaikan oleh Narasumber terkait yang telah dimintai keterangan yang berkaitan dengan Sinergitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan anak jalanan putus sekolah di Kota Makassar maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah kota Makassar yaitu Dinas Sosial telah bersinergi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemberdayaan di bidang pendidikan Anak jalan Kota Makassar. Tahap kerja sama yang dilakukan meliputi anak jalanan (putus sekolah) yang perlu layanan fasilitas

pendidikan berasal dari pendataan dinas Sosial kemudian di berikan ke Dinas pendidikan. Namun untuk mengukur suatu keberhasilan Sinergi antar kedua Instansi masih kurang maksimal akibat persoalan pendataan yang belum akurat/jelas mengenai kriteria anak jalanan di terima Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sinergi yang harusnya menghasilkan energi atau kekuatan yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang diinginkan dan melebihi jumlah yang ingin dicapai.

Koordinasi

Koordinasi pemerintah daerah menurut penjelasan secara resmi dari pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, sebagaimana dalam aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia. Karena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-kesulitan, dalam pelaksanaan koordinasi yang baik seharusnya

memfokuskan pada dasar dan pencapaian hasil, ini tidak kalah pentingnya juga dengan unsur-unsur koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Stooner dalam Ni'matin (2013:17) mengatakan koordinasi merupakan aktifitas dan fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerja sama yang selaras dan tertib mengarah kepada tercapainya tujuan koordinasi secara menyeluruh, jika koordinasi berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi semerautan, kekacauan, tumpang tindih atau kekosongan kerja serta unsur-unsurnya terdiri dari: Perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan. Dalam hal ini penulis ingin menumakan apa saja yang menjadi Koordinasi yang di lakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menangani anak jalanan yang telah putus sekolah agar dapat mendapatkan pendidikan yang semestinya.

Dari data yang di kumpulkan oleh penulis terhadap beberapa informan yang telah di wawancarai, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Koordinasi yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam memberdayakan atau membina anak jalanan di kota Makassar itu masih belum efektif. Sesuia dengan apa hasil yang di temukan bahwa Koordinasinya masih bersifat Personal,

dan belum ada semacam gambaran teknis yang strategis yang susun khusus untuk kasus pembinaan pelayanan pendidikan untuk anak jalanan di kota Makassa. Gambaran kordiansi yang di lakukan oleh pemerintah kota Makassar berupa Dinas sosial membentuk sebuah tim TRC untuk menganani anak jalan, dan kemudian mengrim hasil kinerja tim tersebut kepada Peksos(Pekerja Sosial) yang ada di Rumah perlindungan dan trauma center (RPTC) untuk tindak lanjut peminanan, adapun anak jalanan putus sekolah yang membutuhkan layanan pendidikan di buatkan rekomendasi ke pada Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk di tindak lanjuti.

Komunikasi

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, maupun tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga sulit bagi organisasi untuk mengevaluasi pekerjaan, karena komunikasi adalah sumber informasi

bagi pimpinan atau eksekutif dalam menghasilkan berbagai kebijakan.

Aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi dalam hubungan kerja, pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja dan kerja sama yang baik antar individu dan antar unit organisasi atau departemen, mengetahui sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit organisasi, mengurangi aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustrasi, dan mendorong semangat kerja (Gondokusumo, 1980: 2).

Dalam Kasus menangani Anak Jalan di Kota Makassar tentunya ada beberapa organisasi pemerintahan yang berkaitan tentang hal tersebut. Tentunya untuk dapat mengetahui bagaimana anak jalanan di Kota Makassar dapat di berdayakan dan di bina maka organisasi pemerintah memerlukan komunikasi baik itu internal maupun eksternal untuk tujuan di atas dapat tercapai.

Dari apa yang di sampaikan oleh Narasumber yang telah di mintai keterangan yang berkaitan dengan Komunikasi Antar Dinas Sosial dan Pendidikan dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar maka penulis menyimpulkan bahwa Adanya Komunikasi yang terjadi dalam

pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan di kota Makassar sudah berjalan dengan baik. Dinas Sosial dalam membentuk sebuah unit pelakasan anak jalan di kota Makassar menjadi mudahnya komunikasi antar Dinas Sosial dan yang berkerja di lapangan. Dinas Pendidikan yang tergolong organisasi atau Instansi daerah yang sama dengan Dinas Sosial memudahkan adanya komunikasi yang terjadi terkait anak jalanan putus sekolah di Kota Makassar.

Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu usaha koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan untuk menyesuaikan segala hasil kerja maupun tindakan yang diambil para aparaturnya dalam menjalankan tugas dari penyimpangan atau kekeliruan yang dilakukan agar diperbaiki sehingga diperoleh keserasian antara aturan kerja yang berlaku dengan dengan hasil kerja yang diperoleh. Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti dalam menejemen pemerintahan di Indonesia, banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi kendati keseluruhannya itu dapat disinkronisasikan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama (Syafiie, 2005).

Mengetahui Sinkronisasi antar organisasi yang ada dalam pemberdayaan anak jalanan tentu setiap organisasi harus mengetahui sebab dari terjadinya sebuah problem yang terus menerus berulang walaupun organisasi di dalam pemerintahan telah melakukan tindak lanjut untuk memberdayakan anak jalanan di kota Makassar. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara terhadap salah satu anak jalanan yang di temui di lapangan.

Dari apa yang di sampaikan oleh Narasumber yang telah di mintai keterangan yang berkaitan dengan Komunikasi dalam Sinergitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar maka penulis menyimpulkan bahwa Buntut Sinkronisasi yang terjadi antar Dinas sosial dan Dinas Pendidikan Kota Makassar yaitu adanya keserasian antara aturan kerja yang berlaku dengan dengan hasil kerja yang di peroleh untuk anak jalanan putus sekolah yang di berdayakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar melalui kerja sama kepada Dinas Pendidikan untuk pemberian fasilitas dan layanan pendidikan untuk anak jalanan yang putus sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka Penulis dapat membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut: 1.) Koordinasi yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam memberdayakan atau membina anak jalanan di kota Makassar itu masih belum efektif. Sesuia dengan apa hasil yang di temukan bahwa Koordinasinya masih bersifat Personal, dan belum ada semacam gambaran teknis yang strategis yang susun khusus untuk kasus pembinaan pelayanan pendidikan untuk anak jalanan di kota Makassa. Gambaran kordiansi yang di lakukan oleh pemerintah kota Makassar berupa Dinas sosial membentuk sebuah tim TRC untuk menganani anak jalan, dan kemudian mengrim hasil kinerja tim tersebut kepada Peksos (Pekerja Sosial) yang ada di Rumah perlindungan dan trauma center (RPTC) untuk tindak lanjut peminanan, adapun anak jalanan putus sekolah yang membutuhkan layanan pendidikan di buatkan rekomendasi ke pada Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk di tindak lanjuti. 2.) Adanya Komunikasi yang terjadi dalam pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan di kota Makassar sudah

berjalan dengan baik. Dinas Sosial dalam membentuk sebuah unit pelaksana anak jalan di kota Makassar menjadi mudahnya komunikasi antar Dinas Sosial dan yang berkerja di lapangan. Dinas Pendidikan yang tergolong organisasi atau Instansi daerah yang sama dengan Dinas Sosial memudahkan adanya komunikasi yang terjadi terkait anak jalanan putus sekolah di Kota Makassar. 3) Adanya bentuk Sinkronisasi keserasian antara aturan kerja yang berlaku dengan dengan hasil kerja yang di peroleh untuk anak jalanan putus sekolah yang di berdayakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar melalui kerja sama kepada Dinas Pendidikan untuk pemberian fasilitas dan layanan pendidikan untuk anak jalanan yang putus sekolah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas terkait Implementasi Kebijakan Program SentuhPustaka Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar penulis memberikan saran sebagai berikut: 1.) Peningkatan Sinergitas Antar Pemerintah Daerah yang lebih baik di tingkatkan dengan di bentuknya aturan atau regulasi, dalam memberdayakan anak jalanan di Kota Makassar. 2.) Pemerintah Daerah Kota Makassar yakni Dinas Sosial harusnya dapat

memperbaiki melakukan pendataan anak jalanan yang lebih akurat/jelas mengenai kriteria anak jalanan putus sekolah Sehingga sinergitas antar instansi lainya dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Almira,R (2017). *Pemberdayaan anak jalanan di kota Surabaya (sinergitas antar stakeholders dalam peningkatan kemandirian anak jalanan)*. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3).
- Anggara, O. F. (2016). *Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi Psyiological Well Being pada Anak Jalanan di Jaringan XYZ* (Tesis, Universitas Airlangga, pp. 17–40).
- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), pp. 31–40.
- Covey, S. (2004). *The 7 Habits of Highly Effective People (Cetakan Ke-15)*. Tangerang Selatan: Binarupa Aksara.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (ke-4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

- Hasibuan, Malayu, S.P. (2009). *“Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah”*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Lina, N. (2011). *Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Malang Melalui Kemitraan Antara Pemerintah Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Griya Baca Kota Malang)* (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Maulidar, S. (2019). *Sinergitas Kegiatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam).
- Maryani, Dedeh, Nainggolan, Ruth R, E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- McArdle, J. (1989). Community Development Tools of Trade. *Community Quarterly Journal*, 16, 47–54.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muslim, M. (2013). Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.26>
- Nurdin, A. (2013). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Prajono, & Pranarka. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Washington D.C: CSIS.
- Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15, 121–148.
- Ronawati, A. (2011). Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar. *Sosiokonsepsia*, 16(02), 175–186.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2003). *Corporate Finance 7th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Sabarisman, M. (2015). Peluang dan tantangan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Sakman. (2008). Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar). *Jurnal Supremasi*, 3, 201–221.
- Mulyana, S. (2020). *Sinergitas dan Kemitraan Perencanaan Program Kesehatan di Jawa Barat*. dalam <https://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/05/sinergitas-dan-kemitraan-perencanaan-program/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D (23rd ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Depok: Citra Utama.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publisihing.